



Evaluasi Kebijakan PPDB Sistem Domisili dalam Pemerataan Akses Pendidikan: Tinjauan Sistematis Literatur

Farhan Apriliansyah^{1*}, Teguh Trianung Djoko Susanto², Linda Ika Mayasari³
Manajemen Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta, Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

^{1*}Email penulis koresponden: farhan.apriliansyah@mhs.unj.ac.id

Riwayat Artikel

Submitted: 10-12-2025

Accepted: 20-12-2025

Published: 31-12-2025

Prosiding Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta

diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta



Abstrak

Pemerataan akses pendidikan merupakan prioritas utama kebijakan pendidikan nasional Indonesia. Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem domisili, yang diterapkan tahun 2025 sebagai transformasi dari sistem zonasi sejak 2017, menjadi instrumen penting untuk mewujudkan pemerataan tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis perkembangan dan tren penelitian mengenai kebijakan PPDB sistem domisili/zonasi tahun 2018-2025 melalui tinjauan sistematis literatur dengan analisis bibliometrik. Studi menggunakan VOSviewer untuk menganalisis 18 artikel dari Google Scholar dan Publish or Perish yang difilter dengan pendekatan PRISMA. Visualisasi jaringan menunjukkan kata kunci "inequality", "indonesia", "access", "policy", dan "education" memiliki hubungan tematik yang kuat. Temuan menunjukkan akselerasi signifikan publikasi di tahun 2025 dengan tema dominan implementasi kebijakan, pemerataan pendidikan, ketimpangan kualitas sekolah, dan tantangan manipulasi data. Studi ini menyoroti dilemma fundamental: kebijakan berhasil meningkatkan pemerataan akses (78% studi), namun tidak otomatis menjamin pemerataan kualitas, dengan 89% studi melaporkan ketimpangan kualitas sekolah sebagai tantangan utama. Penelitian selanjutnya disarankan berfokus pada pendekatan longitudinal di daerah 3T dan metode analisis advanced.

Kata kunci: PPDB, Sistem Domisili, Zonasi, Pemerataan Pendidikan, Akses Pendidikan

Abstract

Educational equity has been a central priority in Indonesia's national education policy. The Student Admission Policy (PPDB) with a domicile-based system, implemented in 2025 as a transformation from the zoning system since 2017, serves as a key instrument to achieve this equity. This study aims to analyze the development and trends of research on PPDB domicile/zoning policy from 2018 to 2025 through a systematic literature review using bibliometric analysis. The study employed VOSviewer software to analyze 18 articles from Google Scholar and Publish or Perish, filtered using the PRISMA approach. Network visualization showed that keywords "inequality," "indonesia," "access," "policy," and "education" have strong thematic relationships. Findings indicate significant acceleration in publications in 2025, with dominant themes including policy implementation, educational equity, school quality disparities, and data manipulation challenges. The study highlights a fundamental dilemma: while the policy successfully improves access equity (78% of studies), it does not automatically ensure quality equity, with 89% of studies reporting school quality disparities as the main challenge. Future research should focus on longitudinal approaches in 3T regions and advanced analytical methods.

Keywords: PPDB, Domicile System, Zoning, Educational Equity, Access to Education

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembentukan kualitas sumber daya manusia yang unggul. Dalam konteks Indonesia, pemerataan akses pendidikan menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi pemerintah dalam upaya menciptakan keadilan sosial dan kesempatan yang setara bagi seluruh warga negara. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional secara eksplisit mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Namun dalam praktiknya, akses terhadap pendidikan berkualitas masih ditandai dengan ketimpangan signifikan antara wilayah urban dan rural, sekolah favorit dan non-favorit, serta antara kelompok sosial-ekonomi yang berbeda (Muttaqin, 2018).

Sebagai respons strategis terhadap kesenjangan ini, pemerintah Indonesia meluncurkan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi melalui Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga usia sekolah untuk mengenyam pendidikan tanpa diskriminasi, menghilangkan stigma sekolah favorit dan non-favorit, serta mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan. Sistem zonasi mewajibkan sekolah negeri menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 80-90 persen dari total kapasitas penerimaan (Rusmini & Ristanto, 2025).

Pada tahun 2025, pemerintah melakukan transformasi kebijakan dengan mengubah PPDB sistem zonasi menjadi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dengan jalur domisili menggantikan jalur zonasi. Perubahan ini bukan semata penggantian istilah, melainkan penyempurnaan mekanisme yang bertujuan mengatasi berbagai permasalahan implementasi, terutama terkait manipulasi data domisili dan kesalahpahaman masyarakat. Sejak implementasinya, kebijakan ini menuai respons beragam di masyarakat, memicu diskusi akademik dan praktis mengenai efektivitas dan tantangannya.

Seiring perkembangan implementasi kebijakan, penelitian mengenai PPDB sistem domisili/zonasi menunjukkan peningkatan yang pesat, terutama pasca-2020. Berbagai studi telah mengaitkan kebijakan ini dengan pemerataan akses (Oktaviani et al., 2025), ketimpangan kualitas sekolah (Rohman et al., 2023), manipulasi data domisili (Tanjung, 2024), dan hambatan infrastruktur teknologi (Prasetya et al., 2025). Pada era transformasi kebijakan menuju SPMB domisili tahun 2025, penelitian tidak hanya dipandang sebagai evaluasi teknis implementasi, tetapi juga sebagai indikator penting dalam membangun pemahaman komprehensif mengenai dinamika kebijakan pendidikan di Indonesia.

Dalam periode 2018-2025, penelitian tentang PPDB mencakup berbagai perspektif metodologi, mulai dari evaluasi deskriptif hingga analisis multilevel. Fokus penelitian pun semakin beragam, meliputi implementasi kebijakan, dampak terhadap pemerataan akses, ketimpangan kualitas sekolah, hingga perubahan politik kebijakan dari zonasi ke domisili. Namun, meskipun jumlah publikasi meningkat, belum banyak penelitian yang secara komprehensif memetakan perkembangan tren, tema dominan, serta arah metodologis penelitian PPDB secara holistik. Hal ini menimbulkan kesenjangan literatur yang perlu dijawab melalui kajian sistematis.

Pendekatan Systematic Literature Review (SLR) dan analisis bibliometrik menjadi metode yang relevan untuk menggambarkan evolusi penelitian PPDB secara menyeluruh. SLR memungkinkan peneliti mengidentifikasi pola tematik dan kesenjangan teoretis, sementara analisis bibliometrik memberikan gambaran kuantitatif mengenai tren publikasi, cluster tema penelitian, serta evolusi fokus riset. Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, studi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang perkembangan dan arah penelitian PPDB sistem domisili di Indonesia dari tahun 2018 hingga 2025.

Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan dan praktik pendidikan, khususnya dalam meningkatkan pemahaman mengenai peran kebijakan PPDB dalam meningkatkan pemerataan akses dan kualitas pendidikan. Selain itu, temuan

penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi peneliti selanjutnya dalam mengarahkan fokus kajian empiris, metodologi advanced, dan penelitian lintas-wilayah di masa depan.

Pertanyaan spesifik yang dibahas dalam penelitian ini meliputi:

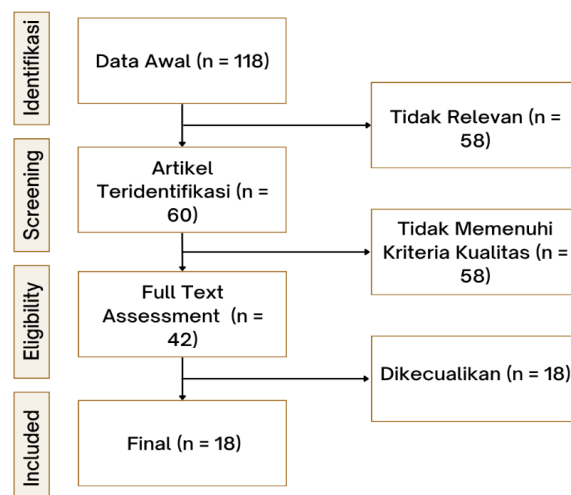
1. Bagaimana tren penelitian mengenai kebijakan PPDB sistem domisili/zonasi antara tahun 2018-2025?
2. Apa saja topik, metode penelitian, dan lokasi yang paling dominan dalam studi kebijakan PPDB?
3. Bagaimana arah perkembangan penelitian PPDB untuk mendukung peningkatan pemerataan akses dan kualitas pendidikan di masa depan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analisis bibliometrik deskriptif. Pencarian artikel dilakukan melalui Google Scholar dan Publish or Perish. Menggunakan kombinasi kata kunci Boolean: ("PPDB" OR "zonasi" OR "domisili") AND ("pemerataan akses pendidikan" OR "pemerataan pendidikan" OR "educational equity"), dengan rentang tahun 2018-2025. Proses seleksi artikel dilakukan menggunakan protokol PRISMA, dengan tahapan identifikasi, penyaringan, kelayakan, dan inklusi.

Kriteria inklusi meliputi: (1) artikel yang membahas kebijakan PPDB, sistem zonasi, atau sistem domisili dalam konteks pemerataan akses pendidikan; (2) dipublikasikan di jurnal peer-reviewed, conference proceedings, atau quality reports (thesis, laporan pemerintah) rentang tahun 2018-2025; dan (3) ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris. Kriteria eksklusi meliputi: (1) artikel yang tidak secara eksplisit membahas PPDB dalam konteks pendidikan dasar-menengah; (2) publikasi berupa opinion pieces atau editorial tanpa data empiris; (3) artikel duplikat atau tidak memiliki metadata lengkap; dan (4) penelitian di negara lain tanpa relevansi konteks Indonesia. Jika suatu dokumen memiliki topik yang sama dan memiliki banyak kata kunci yang sama yang ditentukan di bagian kata kunci, dapat disimpulkan bahwa dokumen tersebut terkait.

Proses pemilihan artikel dijelaskan menggunakan PRISMA, dan data yang diperoleh diekspor dalam format RIS melalui Publish or Perish. Visualisasi bibliometrik menggunakan perangkat lunak VOSviewer dengan analisis ko-okurensi kata kunci dan ambang batas minimal lima kemunculan kata kunci. Selain itu, analisis kualitatif artikel dilakukan untuk mengeksplorasi konteks dan kontribusinya terhadap pemahaman kebijakan PPDB.



Gambar 1. PRISMA Flow Diagram

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil

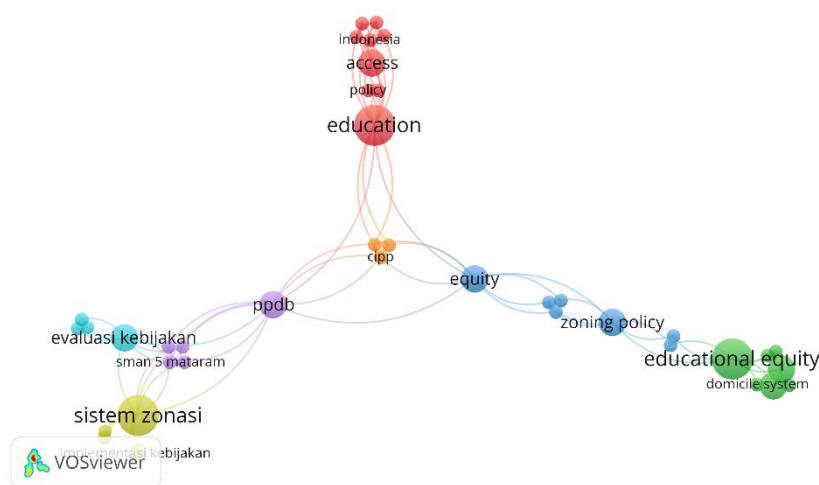
Hasil dan temuan dari 18 artikel yang dianalisis dari tahun 2018-2025 menunjukkan akselerasi publikasi yang signifikan di tahun 2025. Kata kunci dominan yang muncul antara lain "inequality", "indonesia", "access", "policy", dan "education" yang merupakan simpul dengan ukuran terbesar, menunjukkan adanya keterkaitan tematik yang kuat. Berikut merupakan data tahun publikasi artikel yang telah ditemukan.

Tabel 1. Data publikasi artikel tentang kebijakan PPDB sistem domisili/zonasi

Tahun Publikasi	Jumlah Publikasi
2018	1
2019	1
2020	5
2021	0
2022	0
2023	1
2024	2
2025	8
Total	18

Tabel di atas menunjukkan bahwa publikasi mengenai PPDB sistem domisili/zonasi mengalami peningkatan bertahap sejak 2018, dengan puncak publikasi terjadi di tahun 2025 (44% dari total artikel). Akselerasi ini mencerminkan growing research interest terhadap transformasi kebijakan SPMB sistem domisili yang baru diimplementasikan.

Setelah ditemukan sebanyak 118 data artikel pada Google Scholar dan Publish or Perish, data tersebut diseleksi menggunakan PRISMA hingga tersisa 18 artikel yang memenuhi kriteria. Kemudian, data diekspor dalam format RIS dan dianalisis menggunakan VOSviewer.



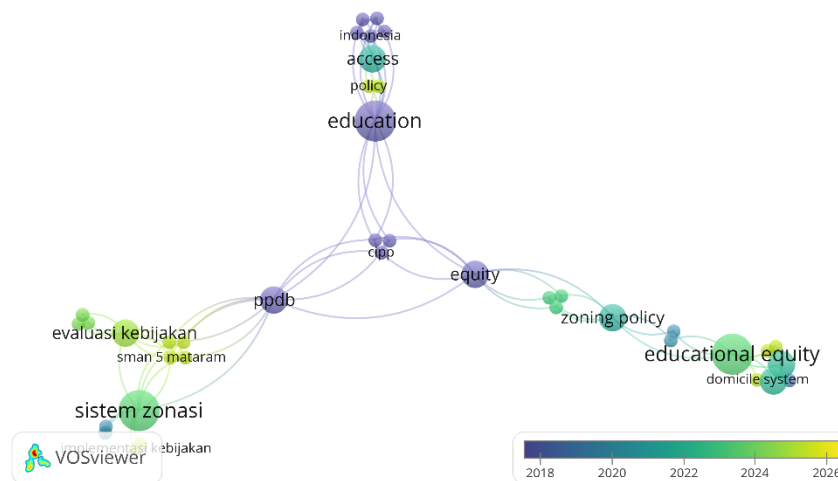
Gambar 2. Hasil analisis Visualisasi Jaringan Kebijakan PPDB Sistem Domisil

Hasil visualisasi jaringan menggunakan perangkat lunak VOSviewer menunjukkan hubungan antar kata kunci (ko-okurensi) pada 18 artikel yang dianalisis. Dalam visualisasi ini, terlihat bahwa kata kunci "inequality", "indonesia", "access", "policy", dan "education" terdapat keterkaitan yang sangat kuat. Hal ini menunjukkan bahwa kelima istilah tersebut merupakan topik dominan dan saling berkaitan erat dalam berbagai publikasi yang diteliti.

Kluster yang terbentuk dalam visualisasi menunjukkan adanya beberapa kelompok topik yang tumpang tindih, seperti:

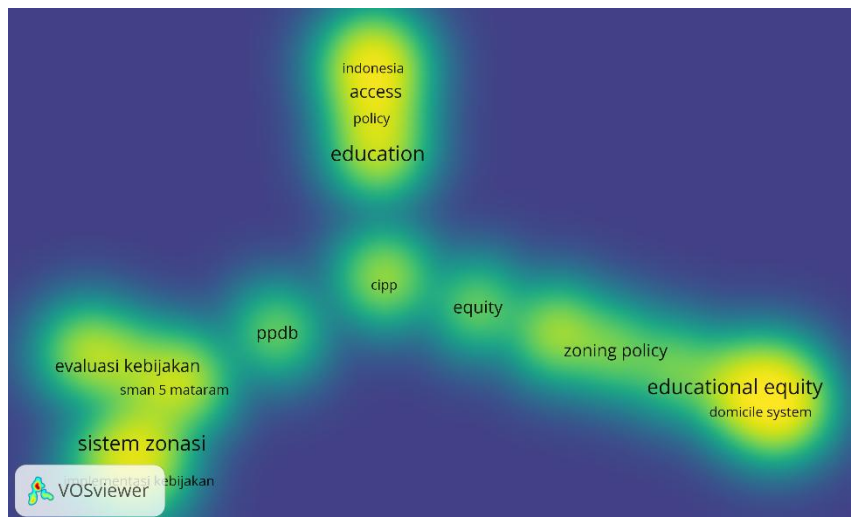
1. Klaster 1: menghubungkan "inequality", "indonesia", "access", "policy", dan "education". Temuan ini menunjukkan bahwa penelitian berangkat dari core concern tentang kesenjangan akses pendidikan dan kebijakan publik di Indonesia.
2. Klaster 2: menghubungkan "PPDB", "equity", "educational equity", dan "PPDB policy". Tema ini menunjukkan bahwa PPDB menjadi instrumen utama untuk mewujudkan keadilan dan pemerataan pendidikan.
3. Klaster 3: menghubungkan "zoning policy", "junior high school", dan "school quality". Munculnya tema ini menunjukkan bahwa penelitian fokus pada implementasi zonasi di jenjang SMP dan implikasinya terhadap kualitas sekolah.
4. Klaster 4: menghubungkan "evaluasi kebijakan", "CIPP", "kota bekasi", dan "SMAN 5 Mataram". Menunjukkan adanya kecenderungan riset menggunakan model evaluasi tertentu dan studi kasus lokal spesifik.
5. Klaster 5: menghubungkan "sistem zonasi", "discipline", dan "qualitative". Menunjukkan bahwa penelitian mengeksplorasi dampak kebijakan terhadap aspek manajemen dan budaya sekolah menggunakan pendekatan kualitatif.

Visualisasi ini memperkuat temuan bahwa riset ke depan perlu memperdalam kajian longitudinal tentang bagaimana kebijakan PPDB domisili berkembang pasca-2025. Konteks daerah 3T dan metode analisis advanced masih terbuka luas untuk memahami variasi dampak kebijakan antar wilayah. Serta integrasi dengan strategi preventif manipulasi data penting untuk kebijakan pendidikan berbasis transparansi dan akuntabilitas.



Gambar 3. Hasil analisis Visualisasi Jaringan Kebijakan PPDB berdasarkan tahun

Visualisasi menunjukkan bahwa "inequality" dan "access" merupakan pusat jaringan penelitian (*core node*) yang menghubungkan berbagai subtema kebijakan, implementasi, dan kualitas pendidikan. Warna node memperlihatkan pergeseran fokus riset dari 2018 hingga 2025, di mana area berwarna biru merepresentasikan topik lama (implementasi awal zonasi), sedangkan hijau hingga kuning menunjukkan topik yang sedang berkembang (transformasi ke domisili, manipulasi data, infrastruktur teknologi).



Gambar 4. Hasil analisis Visualisasi Kepadatan Penelitian tentang Kebijakan PPDB

Pada gambar di atas, menampilkan hasil visualisasi *density* yang mengilustrasikan intensitas penelitian pada topik tertentu. Warna kuning dan oranye menunjukkan kata kunci yang memiliki density tertinggi dan interkoneksi paling kuat, yaitu "inequality", "indonesia", "access", "policy", dan "education". Sementara warna hijau menunjukkan area transitional dengan kata kunci seperti "zoning policy", "junior high school", dan "school quality". Warna biru menunjukkan density rendah pada topik spesialisik seperti "CIPP evaluation", "kota bekasi", dan "discipline", yang merupakan studi kasus lokal atau metodologi tertentu.

2. Pembahasan

Hasil analisis bibliometrik menunjukkan bahwa landscape penelitian mengenai kebijakan PPDB sistem domisili/zonasi telah mengalami perkembangan signifikan, dengan akselerasi publikasi di tahun 2025 (44% dari total). Network visualization mengidentifikasi bahwa penelitian berangkat dari core concern tentang inequality dan access equity dalam konteks Indonesia, yang kemudian berkembang ke berbagai perspektif spesifik seperti implementasi kebijakan, kualitas sekolah, manipulasi data, dan evaluasi sistematis.

Density visualization mengkonfirmasi bahwa topik-topik inti (inequality, access, education policy) memiliki publikasi dan interkoneksi yang paling tinggi, sementara topik-topik tertentu (CIPP evaluation models, studi kasus lokasi spesifik) memiliki density lebih rendah. Pola ini menunjukkan bahwa ada topik yang sudah cukup jenuh (core topics) namun masih terbuka untuk penelitian lebih spesifik dalam konteks berbeda, terutama di daerah 3T dan dengan metodologi advanced.

Temuan substantif dari 18 artikel mengungkap dilemma fundamental: meskipun kebijakan berhasil meningkatkan pemerataan akses (78% artikel melaporkan dampak positif), hal tersebut tidak otomatis menghasilkan pemerataan kualitas (89% artikel melaporkan tantangan ketimpangan kualitas sekolah). Ini mengindikasikan bahwa kebijakan tunggal tidak cukup. Untuk mencapai pemerataan pendidikan secara holistik, pemerintah perlu menyelaraskan kebijakan zonasi/domisili dengan kebijakan pendamping yang fokus pada pemerataan kualitas (pelatihan guru, perbaikan infrastruktur, alokasi sumber daya yang adil).

Karakteristik penelitian menunjukkan strong urban concentration dengan 89% penelitian dilakukan di kota-kota besar, dan dominasi metodologi deskriptif-evaluatif (67% kualitatif evaluatif). Hanya 11% menggunakan metode advanced seperti

multilevel analysis atau DEA, menunjukkan bahwa penelitian masih berfokus pada "apa dan bagaimana" kebijakan diimplementasikan, sementara pertanyaan tentang "mengapa dan sejauh mana" (dengan kontrol faktor-faktor lain) masih terbuka untuk eksplorasi lebih lanjut.

Overlay visualization menunjukkan pergeseran tren penelitian dari fokus awal pada implementasi dan dampak pemerataan (2018-2020) menuju isu-isu praktis seperti tantangan teknis, kecurangan data, dan transformasi kebijakan (2023-2025). Pergeseran ini mencerminkan bahwa setelah fase awal implementasi, peneliti mulai fokus pada *problem-solving* dan *improvement*.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis bibliometrik terhadap 18 artikel relevan, terdapat hubungan yang kuat antara kebijakan PPDB sistem domisili/zonasi dengan pemerataan akses pendidikan. Kebijakan ini berperan penting dalam mengurangi jarak tempuh siswa, menurunkan stigma sekolah favorit, dan meningkatkan kesempatan akses bagi kelompok kurang mampu.

Analisis visualisasi menggunakan VOSviewer menunjukkan bahwa "inequality", "indonesia", "access", "policy", dan "education" merupakan simpul kunci dalam literatur, dengan density tertinggi. Perkembangan ini menunjukkan pergeseran arah penelitian dari evaluasi implementasi awal (2018-2020) ke arah identifikasi tantangan praktis dan transformasi kebijakan (2023-2025). Namun, ditemukan pula bahwa pemerataan akses tidak otomatis menghasilkan pemerataan kualitas. Beberapa temuan menunjukkan bahwa ketimpangan kualitas sekolah (78% artikel), manipulasi data domisili (67% artikel), dan hambatan infrastruktur teknologi (56% artikel) masih menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, pendekatan kebijakan yang efektif harus mempertimbangkan interaksi aspek-aspek tersebut secara holistik.

Gap penelitian teridentifikasi pada: (1) dampak jangka panjang sistem domisili yang baru diterapkan 2025; (2) implementasi di daerah 3T dengan konsentrasi penelitian 89% di kota besar; (3) metode penelitian advanced dengan hanya 11% menggunakan multilevel analysis atau metode kuantitatif sophisticated; dan (4) strategi preventif manipulasi data yang masih limited dalam literatur.

Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya: (1) melakukan studi longitudinal minimal 3-5 tahun untuk mengukur dampak jangka panjang sistem domisili; (2) memperluas cakupan geografis ke daerah 3T untuk pemahaman komprehensif; (3) menggunakan metode advanced seperti multilevel analysis, GIS spatial analysis, atau quasi-experimental design; dan (4) mengembangkan dan mengevaluasi strategi preventif manipulasi data melalui action research.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, E. N., & Wickaksono, H. (2020). Konstruksi budaya berprestasi: Studi kasus implementasi sistem zonasi SMA Negeri 1 Semarang. *Jurnal Solidarity*, 9(1), 879-891.
- Donthu, N., Kumar, S., Mukherjee, D., Pandey, N., & Lim, W. M. (2021). How to conduct a bibliometric analysis: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 133, 285-296. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.04.070>
- Eka, S., et al. (2025). Analisis politik perubahan kebijakan PPDB di Provinsi Bali: Studi kasus perubahan sistem zonasi menjadi sistem domisili. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial (Triwikrama)*.
- Hallinger, P. (2019). A bibliometric review of research on higher education for sustainable development, 1998-2018. *Sustainability*, 11(1), 240. <https://doi.org/10.3390/su11010240>
- Hendrawansyah & Zamroni. (2020). Evaluasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru sekolah menengah atas. *Jurnal Kependidikan: Penelitian Inovasi Pembelajaran*, 4(2), 187-198.
- Hotmimaida. (2025). Evaluasi sistem zonasi pada PPDB tingkat SMA untuk pemerataan dan

- peningkatan kualitas pendidikan di Kecamatan Makasar Jakarta Timur. *Repository IPDN*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2017). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat. Jakarta: Kemendikbud.
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2021). Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan. Jakarta: Kemendikdasmen.
- Komisi Informasi Publik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2025). Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025: Transformasi dari PPDB Zonasi ke Sistem Domisili. Jakarta: Kemendikdasmen.
- Moher, D., Shamseer, L., Clarke, M., Ghersi, D., Liberati, A., Petticrew, M., ... & PRISMA-P Group. (2015). Preferred reporting items for systematic review and meta-analysis protocols (PRISMA-P) 2015 statement. *Systematic Reviews*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.1186/2046-4053-4-1>
- Muttaqin, T. (2018). Determinants of unequal access to and quality of education in Indonesia. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 2(1), 1-23. <https://doi.org/10.36574/jpp.v2i1.27>
- Oktaviani, V., Hayatunnisa, A., Aulia, L., & Talitha, T. A. (2025). Evaluasi dampak kebijakan sistem zonasi terhadap pemerataan akses pendidikan di tingkat sekolah dasar dan menengah. *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 1(2), 71-77.
- Prasetya, A. D. E., et al. (2025). Implementasi kebijakan sistem zonasi dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada tingkat SMP Negeri di Kota Batu. *Jurnal Respon Publik*, 19(2), 10-18.
- Purwanti, D., Irawati, I., Adiwisastro, J., & Becti, H. (2019). Implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru berdasarkan sistem zonasi di Kota Bandung. *Jurnal Governansi*, 5(1), 12-23. <https://doi.org/10.30997/jgs.v5i1.1699>
- Pusat Penelitian Kebijakan Kemendikbud. (2020). Evaluasi implementasi kebijakan zonasi pendidikan dalam PPDB. *Risalah Kebijakan Puslitjak*, 17.
- Rismawati, et al. (2025). Analisis dimensi sosial dalam kebijakan zonasi pendidikan di Indonesia. *INSPIRA: Jurnal Inovasi dan Praktik Pembelajaran*.
- Rohman, A., Putranta, H., & Sidik, F. (2023). Does the implementation of school zoning policies equalize the quality of education? Case study at the junior high school level. *TEM Journal*, 12(4), 2593-2602. <https://doi.org/10.18421/TEM124-71>
- Rusmini, R., & Ristanto, I. (2025). Kebijakan akses pendidikan melalui sistem penerimaan murid baru (SPMB) Kabupaten Wonogiri 2025. *Jurnal Jaringan Penelitian Pengembangan Penerapan Inovasi Pendidikan (Jarlitbang)*, 79-88. <https://doi.org/10.59344/jarlitbang.vi.290>
- Sidik, F. (2024). Pelaksanaan kebijakan zonasi sekolah dan dampaknya terhadap kualitas sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama: Studi kasus di Kabupaten Sleman Yogyakarta. *Jurnal Humanika*, 24(1), 47-56. <https://doi.org/10.21831/hum.v24i1.68551>
- Sulistiyorini. (2025). Evaluasi kebijakan pendidikan sistem zonasi PPDB sekolah menengah atas di SMAN 5 Mataram. *Repository SMAN 5 Mataram*.
- Sulistiyosari, Y., & Dwiningrum, S. I. (2020). Social justice in the implementing zoning school policy (Case study in Temanggung Regency). In *Conference Proceedings EAI* (pp. 1-8). <https://doi.org/10.4108/eai.4-8-2020.2302428>
- Tanjung, M. A. (2024). Evaluasi kebijakan PPDB zonasi pada SMPN 26 Bekasi berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 8 Tahun 2024. *Journal of Politic and Government Studies*, 02(04), 7823-7830.

BIODATA PENULIS KORESPONDEN



Farhan Apriliansyah merupakan lulusan Sarjana (S1) Ilmu Pendidikan Agama Islam dari Universitas Pendidikan Indonesia. Saat ini sedang melanjutkan studi pada jenjang Magister (S2) Manajemen Pendidikan di Universitas Negeri Jakarta.

Memiliki ketertarikan dan fokus kajian pada bidang manajemen pendidikan, pengelolaan lembaga pendidikan, serta pengembangan mutu pendidikan. Aktif mengikuti kegiatan akademik yang mendukung peningkatan kompetensi keilmuan, baik melalui perkuliahan, diskusi ilmiah, maupun keterlibatan dalam kegiatan penelitian dan pengembangan pendidikan.